

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecenderungan dunia dalam memberikan perhatian terhadap hak-hak anak khususnya di bidang pendidikan terus bergulir. Dalam *The World Education Forum* (2000) di Dakar, ditegaskan kembali perlunya memberikan perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi, yaitu pendidikan yang melayani semua anak termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus. Dalam PERMENDIKNAS RI No. 70 tahun 2009 Pasal 1 Pendidikan Inklusif didefinisikan “sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”.

Dalam kenyataannya sebagian dari anak berkebutuhan pendidikan khusus dan anak berkesulitan belajar belum sepenuhnya mendapat perhatian secara maksimal. Data riil jumlah anak-anak berkebutuhan khusus di Jawa Tengah, hingga saat ini belum ada. Namun jika mengacu pada prediksi UNESCO, maka di provinsi ini terdapat sekitar 300.000 anak yang menderita kelainan. Dari jumlah tersebut, yang saat ini sudah bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) tercatat baru sekitar 8.000 anak. Sebagian lainnya, ada yang menempuh pendidikan di sekolah-sekolah reguler, namun tidak terdeteksi secara pasti.

Kebanyakan dari mereka merupakan anak-anak low vision, lambat belajar dan tuna wicara.

Orang tua dan masyarakat belum dapat berbuat banyak, karena semua proses pendidikan ditumpukan kepada guru dan jajaran pendidikan saja. Seyogyanya, agar semua anak berkebutuhan pendidikan khusus dapat ditampung di SLB. Salah satu penyebab masih terbatasnya jumlah SLB adalah biaya operasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah biasa/reguler. Selain itu SLB yang ada biasanya berlokasi di ibu kota propinsi, kabupaten/kota, padahal anak berkebutuhan pendidikan khusus tersebar di daerah yang sulit dijangkau. Atas dasar pertimbangan tersebut perlu diselenggarakannya sekolah inklusi yaitu sekolah yang menggabungkan antara siswa normal dengan siswa berkebutuhan khusus itu menjadi sangat mendesak, lantaran SLB yang dibangun selama ini hanya berkedudukan di tengah kota, belum merambah sampai ke desa-desa.

Suatu kenyataan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah jumlahnya relatif masih sangat sedikit. Salah satu solusi yang saat ini sedang menjadi idola para orang tua, adalah dengan dibukanya Sekolah Inklusi. Pendidikan inklusi ini, adalah sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh, yang kelak diharapkan bisa memberi jaminan bahwa strategi nasional tentang "Pendidikan Untuk Semua" benar-benar dimiliki semua kalangan, tidak membedakan apakah mereka tergolong anak-anak berkelainan atau tidak. Khususnya di Propinsi Jawa Tengah, program Inklusi sudah mulai dibuka sejak tahun 2003. Pada awalnya sekolah itu baru digarap di

12 sekolah. Hingga kini jumlah Sekolah Inklusi di Jateng sudah mencapai 117 unit. Dari jumlah tersebut, untuk tingkat SMP/MTs terdapat 10 unit, SMA/MA 1 unit, sedang selebihnya Sekolah Inklusi untuk tingkat SD.

Kesulitan belajar (*Learning Disability*), terdiri dari kesulitan belajar umum seperti lamban belajar (*Slow Learner*), dan kesulitan belajar khusus yaitu kesulitan belajar pada bidang pelajaran tertentu saja misalnya kesulitan membaca (*Disleksia*), kesulitan berhitung (*Diskalkulia*) dan kesulitan menulis (*Disgrafia*). Anak-anak ini, seperti anak-anak yang memerlukan layanan khusus, merupakan bagian dari mereka yang berkebutuhan pendidikan khusus yang jake mendapat layanan pendidikan yang tepat akan dapat dikembangkan potensinya secara optimal.

Sebagian dari anak yang memerlukan layanan khusus itu mungkin sekali selama ini belajar di sekolah biasa/reguler. Namun karena tidak ada pelayanan pendidikan khusus di sekolah reguler, maka anak-anak ini mempunyai potensi besar untuk mengulang kelas dan akhirnya putus sekolah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, perlu dikembangkan manajemen pendidikan terpadu (inklusi) yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pendidikan bagi anak yang memerlukan layanan khusus. Selama ini pendidikan terpadu baru diselenggarakan untuk anak berkebutuhan pendidikan khusus, namun belum dilakukan sebagaimana yang diharapkan. Agar pengembangan pendidikan terpadu dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dan tetap mengutamakan peningkatan mutu pendidikan, maka diperlukan suatu manajemen sekolah terpadu (inklusi) yang baik.

Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah perlu didukung kemampuan manajerial Kepala Sekolah. Kepala Sekolah hendaknya berupaya untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara optimal.

Bertolak dari filosofi Bhineka Tunggal Ika, kelainan (kecacatan) dan berkebakatan hanyalah satu bentuk kebhinekaan seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, atau agama. Di dalam individu berkelainan pastilah dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu, sebaliknya di dalam individu berbakat pastilah terdapat juga kecacatan tertentu, karena tidak ada mahluk di bumi ini yang diciptakan sempurna. Kecacatan dan keunggulan tidak memisahkan peserta didik satu dengan lainnya, seperti halnya perbedaan suku, bahasa, budaya, atau agama. Hal ini harus diwujudkan dalam system pendidikan. System pendidikan harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam, sehingga mendorong sikap silih asah, silih asih, dan silih asuh dengan semangat toleransi seperti halnya yang dijumpai atau dicitakan dalam kehidupan sehari-hari.

Landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah: (1) Konvensi PBB tentang Hak anak tahun 1989, (2) Deklarasi Pendidikan untuk Semua di Thailand tahun 1990, (3) Kesepakatan Salamanka tentang Pendidikan inklusi tahun 1994, (4) UU No. 4 tentang Penyandang Cacat tahun 1997, (5) UU No. 23 tentang Perlindungan Hak Anak tahun 2003, (6) PP No. 19 tentang

Standar Pendidikan Nasional tahun 2004, (7) Deklarasi Bandung tentang Menuju Pendidikan Inklusi tahun 2004.

Manajemen pendidikan inklusi dijamin oleh: (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 32, tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusif atau berupa sekolah khusus, dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/u/1986 pasal 1 ayat 1 bahwa, pendidikan terpadu adalah model penyelenggaraan program pendidikan bagi anak cacat yang diselenggarakan bersama anak normal di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan, (5) Surat Edaran Dirjen Nomor 380/C.C6/MN/2003 perihal Pendidikan Inklusi. Kebetulan SMP Negeri 4 Wonogiri dijadikan Sekolah Dasar Inklusi yang telah ditunjuk dari Diknas Kabupaten Wonogiri dengan Kep. Mendikbud No. 002/U/1986 Pendidikan Sekolah Terpadu SE Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380 C. CS/MN/2003 untuk melaksanakan program pendidikan inklusi.

Landasan pedagogis manajemen pendidikan inklusi adalah pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab. Jadi melalui pendidikan, peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuan ini mustahil tercapai jika sejak awal mereka diisolasi dari teman sebayanya di sekolah-sekolah khusus. Betapapun kecilnya mereka harus diberi kesempatan bersama teman sebaya (Anonim, 2003: 12).

Selama ini, pendidikan bagi anak yang berkelainan diselenggarakan di Sekolah Luar biasa (SLB). Sementara itu, lokasi SLB pada umumnya berada di ibukota kabupaten. Akibatnya sebagian anak-anak berkelainan, karena factor ekonomi terpaksa tidak disekolahkan oleh orang tuanya karena lokasi SLB jauh dari rumahnya, sedangkan SMP terdekat tidak bersedia menerima karena merasa tidak mampu melayaninya. Sebagian yang lain selama ini diterima di SMP terdekat, namun karena ketiadaan pelayanan khusus bagi mereka, akibatnya mereka berpotensi tinggal di kelas yang pada akhirnya putus sekolah. Akibat lebih jauh, program wajib belajar akan sulit tercapai.

Dalam rangka menanggulangi hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan suatu terobosan berupa pemberian kesempatan dan peluang kepada anak-anak berkelainan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum bersama-sama dengan anak normal di sekolah dasar terdekat sesuai dengan kebutuhannya. Pola pendidikan seperti ini disebut pendidikan inklusi.

Sedangkan di lingkungan SMP Negeri 4 Wonogiri juga terdapat berbagai macam kemampuan belajar siswa. Ada siswa yang cepat belajarnya, ada yang sedang belajarnya dan adapula siswa yang lamban belajarnya. Dalam hal ini, siswa yang lamban belajarnya, bisa juga disebabkan oleh salah satu kondisi siswa yang berkelainan yang dalam hal tertentu berbeda dengan anak lain pada umumnya. Salah satu upaya membantu mengatasi masalah tersebut, perlu diadakan pendidikan terpadu yang berorientasi pada masalah kesulitan belajar siswa diklasifikasi menurut tingkat kesulitannya.

Tujuan diadakan Pendidikan Inklusi di SMP Negeri 4 Wonogiri adalah untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang berkelainan, dapat belajar bersama anak lain atau normal sepanjang hari dikelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama demikian pula anak yang berbakat. Secara khusus bagi peneliti bahwa dengan keberadaan SMP inklusi tersebut menjadi hal yang menarik untuk dicermati serta diungkap kepermukaan untuk dijelaskan sebagaimana pembahasan pada latarbelakang di atas. Karena sebagian dari SMP inklusi rata-rata masih termasuk baru berdiri dan belum pernah meluluskan siswa. Sehingga hal ini mendorong penulis untuk mengangkat masalah ini sesuai dengan focus kajian yang penulis tetapkan.

Berdasarkan pada penjelasan di atas penulis memilih dan menetapkan Pengelolaana sekolah berbasis inklusi yang berada di SMP Negeri 4 Wongori sebagai objek kajian. Oleh karena itu pendidikan inklusi yang berada di SMP Negeri 4 Wonogiri adalah merupakan wujud pengembangan sekolah inklusi.

B. Fokus Penelitian

Berlatar belakang pada masalah dasar dan makro seperti tersebut di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah "bagaimana pengelolaan kelas berbasis inklusi di SMP Negeri 4 Wonogiri, yang terbagi dalam sub fokus sebagai berikut:

1. Bagaimana persiapan guru dalam mengelola kelas berbasis inklusi di SMP Negeri 4 Wonogiri?
2. Bagaimana pengelolaan siswa pada saat penyampaian materi, dalam kelas berbasis inklusi di SMP Negeri 4 Wonogiri?
3. Bagaimana pengelolaan sarana prasarana dalam kelas berbasis inklusi di SMP Negeri 4 Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Persiapan guru dalam mengelola kelas berbasis inklusi di SMP Negeri 4 Wonogiri.
2. Pengelolaan siswa pada saat penyampaian materi dalam kelas berbasis inklusi di SMP Negeri 4 Wonogiri.
3. Pengelolaan sarana prasarana dalam kelas berbasis inklusi di SMP Negeri 4 Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Sebagai referensi ilmiah untuk memperoleh manfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan dan

menerapkan untuk kasus nyata yang terjadi di lapangan. Manajemen pada umumnya, khususnya mengenai manajemen pendidikan inklusi.

2. Manfaat Praktis praktis

- a. Memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan dalam rangka pembinaan Kepala Sekolah berkaitan dengan penerapan manajemen pendidikan inklusi.
- b. Memberikan masukan pada Sekolah SMP yang berada di lingkungan Kabupaten Wonogiri yang memiliki siswa berkelainan bisa diikutkan pada pendidikan inklusi.
- c. Peneliti lain, sebagai acuan untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan penerapan manajemen pendidikan inklusi

E. Daftar Istilah

1. Pendidikan Inklusif didefinisikan sebagai “sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”, sesuai PERMENDIKNAS RI No. 70 tahun 2009 Pasal 1
2. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yaitu anak didik yang harus mendapatkan pelayanan khusus di sekolah regular misalnya anak berkesulitan belajar (*Learning Disability*), terdiri dari kesulitan belajar umum seperti lamban belajar (*Slow Learner*), dan kesulitan belajar khusus yaitu kesulitan belajar pada bidang pelajaran tertentu saja

misalnya kesulitan membaca (*Disleksia*), kesulitan berhitung (*Diskalkulia*) dan kesulitan menulis (*Disgrafia*). Bahkan Anak yang Tunanetra (tidak bias melihat) dan Tuna Laras (Sulit menyesuaikan diri).

3. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses interaksi edukatif (Djamarah,2005 : 144)
4. Pendidikan inklusi merupakan model pendidikan yang memberi kesempatan bagi siswa yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama siswa-siswa lain seusianya yang tidak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi lahir atas dasar prinsip bahwa layanan sekolah seharusnya diperuntukkan untuk semua siswa tanpa menghiraukan perbedaan yang ada, baik siswa dengan kondisi kebutuhan khusus, perbedaan sosial, emosional, cultural, maupun bahasa (Florian, 2008: 35).
5. Kelas Inklusi model *pull out* adalah sebuah kelas yang terdiri dari anak berkelainan belajar bersama anak normal di kelas reguler.
6. Proses Pembelajaran Individual (PPI) yaitu proses kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah inklusi pada anak berkebutuhan khusus di dalam ruang khusus dengan tenaga guru yang mempunyai kompetensi khusus misalnya menguasai huruf Braille untuk pembelajaran anak Tunanetra.